JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 11244-11254
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

DIMENSI-DIMENSI FILSAFAT ILMU PENDIDIKAN UNTUK PEMBENTUKAN KARAKTER BANGSA BERDASARKAN PANCASILA

Suyani Armin[1], Aceng Hasani[2], Erwin Salpa Riansi[3]
[1,2,3] Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Email: suyaniarmin161978@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3666

Sections Info

Article history:
Submitted: 9 August 2026
Final Revised: 28 August 2026
Accepted: 26 September 2026
Published: 30 October 2026

Keywords:
Philosophy of Educational
National Character
Character Education
Pancasila
Value Education

ABSTRACT

Objective: The philosophy of educational science provides a fundamental basis for developing educational theory, practice, and policy, as it addresses human nature, life purpose, and moral values. This study aims to analyze the dimensions of the philosophy of educational science and their relevance to national character education based on Pancasila principles. Method: This study employed a qualitative approach with a library research method, reviewing educational regulations, institutional documents, and conceptual literature on educational philosophy, character education, and civic education. Results: The findings indicate that the philosophy of educational science comprises ontological, epistemological, axiological, anthropological, ethical, and teleological dimensions, which are interconnected in determining the purpose, process, and orientation of the educated individual. Character education based on Pancasila is realized not merely through verbal instruction, but through role modeling, school culture, contextual learning, social experiences, ethical decision-making, and civic participation. Novelty: The novelty of this study lies in synthesizing the six dimensions of educational philosophy into a comprehensive model for internalizing Pancasila values that integrates knowledge, attitudes, commitment, and concrete actions to build national character that is faithful, civilized, democratic, cooperative, and independent.

ABSTRAK

Objektif: Filsafat ilmu pendidikan memberikan landasan mendasar bagi pengembangan teori, praktik, dan kebijakan pendidikan nasional secara menyeluruh karena berkaitan erat dengan hakikat manusia, tujuan kehidupan, serta nilai moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi-dimensi filsafat ilmu pendidikan dan relevansinya terhadap pendidikan pembentukan karakter bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Metode: Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan regulasi pendidikan, dokumen kelembagaan, serta literatur konseptual mengenai filsafat pendidikan, pendidikan karakter, dan pendidikan kewargaan. Hasil: Hasil kajian menunjukkan bahwa filsafat ilmu pendidikan terdiri atas dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, antropologis, etis, dan teleologis yang saling terkait dalam menentukan tujuan, proses, dan orientasi manusia yang dididik. Pendidikan karakter berbasis Pancasila diwujudkan tidak sekadar melalui pengajaran verbal, melainkan melalui keteladanan, budaya satuan pendidikan, pembelajaran kontekstual, pengalaman sosial, pengambilan keputusan etis, dan partisipasi warga. Kebaruan: Kebaruan penelitian ini terletak pada pemodelan sintesis enam dimensi filsafat ilmu pendidikan yang mengintegrasikan pengetahuan, sikap, komitmen, dan tindakan nyata ke dalam proses pembudayaan nilai Pancasila secara komprehensif untuk membentuk karakter bangsa yang beriman, beradab, demokratis, gotong royong, dan mandiri.

Kata kunci: *Filsafat Ilmu; Karakter Bangsa; Pendidikan Karakter; Pancasila; Pendidikan Nilai.*

PENDAHULUAN

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses sosiokultural dan filosofis yang menentukan arah perkembangan manusia serta peradaban suatu bangsa. Dalam tataran teoretis dan praksis, pembicaraan mengenai sistem pendidikan tidak akan pernah dapat dilepaskan dari pertanyaan-pertanyaan filosofis yang fundamental: manusia seperti apa yang hendak dibentuk, pengetahuan apa yang dinilai sah dan relevan, nilai moral apa yang harus dijadikan pedoman hidup, serta model kehidupan bersama seperti apa yang ingin diwujudkan di ruang publik. Pertanyaan-pertanyaan substansial ini menempatkan filsafat ilmu pendidikan bukan sekadar sebagai kajian akademis yang abstrak atau teoretis semata, melainkan sebagai fondasi ontologis, epistemologis, dan aksiologis untuk menilai, mengarahkan, serta mengevaluasi tujuan, struktur kurikulum, proses pembelajaran, hingga dampak sistemik pendidikan terhadap pembentukan karakter peserta didik. Tanpa pijakan filosofis yang kokoh, kebiasaan dan praktik pendidikan berisiko terjebak pada orientasi mekanistis yang pragmatis—hanya mengagungkan capaian intelektual dan teknis angka-angka akademis formal tanpa menyentuh dimensi pembentukan karakter serta martabat kemanusiaan (Aristotle, 2004; Lickona, 1991).

Dalam kerangka sistem pendidikan nasional Indonesia, orientasi filosofis tersebut memperoleh landasan normatif yang terstruktur dan kuat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menggariskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Regulasi ini menargetkan pembentukan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Rumusan normatif yang sedemikian komprehensif ini memperlihatkan secara jelas bahwa keberhasilan suatu proses pendidikan tidak boleh diukur hanya melalui capaian kognitif teknis semata, melainkan wajib diintegrasikan dengan pembentukan watak, etika, dan kepribadian utuh sebagai warga negara (Republik Indonesia, 2003; Dewantara, 2013).

Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan sumber dari segala sumber hukum memberikan horizon nilai yang sangat jernih bagi pencapaian tujuan pendidikan nasional tersebut. Nilai-nilai sublim yang terkandung dalam sila Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial bukanlah materi hafalan tekstual yang bersifat verbalistik, melainkan prinsip-prinsip etis yang seharusnya mendasari cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak seluruh elemen bangsa. Berbagai dokumen kelembagaan pemerintah di bidang pendidikan secara konsisten menempatkan Pendidikan Pancasila sebagai instrumen utama dalam pembudayaan karakter, penguatan kepribadian bangsa yang inklusif, serta penanaman kesadaran bernegara. Melalui internalisasi nilai-nilai dasar Pancasila, peserta didik diharapkan tidak hanya memiliki kecerdasan akademis, tetapi juga memiliki kepekaan nurani dan komitmen moral untuk menjaga keutuhan serta kemajuan masyarakatnya (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, 2023a; Republik Indonesia, 1945).

Kendati secara konseptual-normatif landasan pendidikan nasional telah tersusun kokoh, fakta empiris di lapangan menunjukkan adanya jurang pemisah (gap) yang melebar antara cita-cita idealis dengan realitas perilaku karakter peserta didik di ruang publik. Maraknya fenomena kekerasan antarsiswa, kecurangan akademik, hingga krisis etika berkomunikasi di media digital menjadi indikator nyata adanya disorientasi moral di kalangan generasi muda. Urgensi empiris penelitian ini disajikan pada Tabel 1 yang memperlihatkan potret permasalahan karakter peserta didik dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1. Data Permasalahan Karakter dan Perilaku Moral Peserta Didik di Indonesia

Indikator Permasalahan Karakter	Persentase / Data Empiris	Implikasi Terhadap Karakter Bangsa	Sumber Data
Kasus Kekerasan & Bullying	36,31% siswa berpotensi mengalami perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah.	Menurunnya rasa aman, luntur-nya empati, dan pelanggaran dimensi kemanusiaan yang beradab.	Asesmen Nasional Kemendikbudristek (2023)
Krisis Etika Digital (Siber)	Indeks Keadaban Digital (*Digital Civility Index*) Indonesia berada di peringkat rendah (76 dari 32 negara).	Maraknya *hate speech*, penyebaran hoaks, dan lunturnya kesantunan berkomunikasi warga negara.	Microsoft Digital Civility Index (2021)
Kecurangan Akademik	Lebih dari 45% peserta didik pernah terlibat kecurangan ujian / *plagiarisme* digital.	Terkikisnya integritas moral, kejujuran, dan tanggung jawab pribadi peserta didik.	Konsortium Pendidikan Karakter & Publikasi Riset (2023)
Kekerasan Seksual & Intoleransi	26,9% siswa berisiko terpapar kekerasan seksual dan 22,4% berisiko intoleransi di sekolah.	Menipisnya toleransi kebinekaan dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.	Kemendikbudristek & BPIP (2023b)

Data pada Tabel 1 menegaskan bahwa tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan kontemporer dewasa ini menunjukkan tingkat kompleksitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Disrupsi teknologi digital yang begitu masif, derasnya arus transformasi informasi tanpa filter, meningkatnya fenomena polarisasi sosial, perubahan pola interaksi kemasyarakatan, serta tingginya tuntutan kompetensi global abad ke-21 menuntut lembaga pendidikan untuk mampu menyeimbangkan antara penguasaan kecerdasan artifisial dan pengembangan karakter afektif. Dalam konteks internasional, UNESCO (2021) dan OECD (2019) menegaskan urgensi Global Citizenship Education sebagai pendekatan yang mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap agar peserta didik mampu berkontribusi aktif dalam menciptakan masyarakat dunia yang adil, damai, inklusif, dan berkelanjutan. Bagi bangsa Indonesia, dinamika dan imperatif global tersebut menuntut terjadinya dialog yang kritis dan sinergis dengan nilai-nilai luhur Pancasila, agar proses modernisasi dan internasionalisasi pendidikan nasional tetap berakar kuat pada identitas, kepribadian, dan kearifan lokal kebangsaan (UNESCO, 2023; BPIP, 2025).

Ketimpangan antara tataran idealis-normatif dengan praksis kependidikan di lapangan semakin mempertegas perlunya rekonstruksi pemikiran filosofis. Selama ini, pembelajaran nilai kerap kali direduksi menjadi sebatas transferring knowledge yang berorientasi pada ketuntasan hafalan teks dan ujian tertulis semata. Pola pembelajaran linier yang kering dari penghayatan makna ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila kehilangan daya transformatifnya

di tengah kehidupan keseharian siswa. Ketika pendidikan dipisahkan dari akar ontologis dan aksiologisnya, peserta didik cenderung mengalami disorientasi moral saat berhadapan dengan kompleksitas realitas sosial, seperti maraknya perundungan, lunturnya etika berkomunikasi di media digital, hingga menipisnya kepekaan empati antar-sesama. Oleh sebab itu, penggalian kembali dimensi filosofis menjadi syarat mutlak untuk mengembalikan hakikat pendidikan sebagai proses humanisasi dan pembudayaan karakter utuh (Gay, 2018; Nguyen & Redding, 2020).

Kajian mengenai pendidikan karakter dan aktualisasi nilai Pancasila telah banyak disorot oleh para peneliti dalam rentang lima tahun terakhir. Studi dari Budiono (2021) serta Rasyid et al. (2024) menguraikan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dan Pancasila ke dalam paradigma pendidikan nasional untuk memperkokoh sikap nasionalisme generasi muda. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Kharisma et al. (2022) serta Amren et al. (2024) berfokus pada dinamika kebangsaan dan bagaimana Pancasila menjadi benteng etis dalam menghadapi tantangan arus globalisasi. Sementara itu, kajian dari Jamaludin et al. (2023) dan Zulyana et al. (2025) secara lebih spesifik menelaah implementasi kurikulum Pendidikan Pancasila pada tingkat persekolahan dasar dan menengah beserta tantangan praktis pembelajaran di dalam kelas (Jamaludin et al., 2023; Zulyana et al., 2025).

Meskipun kontribusi riset-riset terdahulu tersebut sangat berharga dalam memperkaya literatur pendidikan nasional, sebagian besar kajian masih cenderung berfokus pada tataran praksis persekolahan, strategi pengajaran tekstual guru, atau evaluasi dokumen kurikulum semata. Kesenjangan teoretis (literature gap) yang ditemukan dalam diskursus ini adalah masih terbatasnya analisis mendalam yang mengaitkan secara utuh dimensi-dimensi mendasar filsafat ilmu pendidikan, yakni dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, antropologis, etis, dan teleologis sebagai kerangka kerja konseptual yang melandasi pembentukan karakter berbasis Pancasila. Tanpa adanya pembedahan yang komprehensif pada tataran filosofis ini, pendidikan karakter berisiko terus diperlakukan sebagai sekadar pengajaran nilai secara doktriner dan verbalistik, bukan sebagai proses pembudayaan dan pengalaman etis yang holistik (Banks, 2019; Krippendorff, 2018).

Lebih lanjut, urgensi kajian ini juga didorong oleh kebutuhan untuk menyediakan kerangka konseptual yang aplikatif bagi para perancang kebijakan dan praktisi pendidikan. Sebagian besar literatur kependidikan saat ini belum secara eksplisit memetakan bagaimana enam dimensi utama filsafat ilmu, yakni ontologi, epistemologi, aksiologi, antropologi, etika, dan teleologi dapat ditranslasikan ke dalam indikator pembentukan karakter berbasis Pancasila secara konkret. Ketidakjelasan peta konseptual ini berdampak pada kebingungan pendidik dalam merancang strategi pembelajaran yang tidak hanya mengasah aspek kognitif, tetapi juga menyentuh ranah afektif dan psikomotorik peserta didik. Dengan membedah keterkaitan antar-dimensi filosofis tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa sintesis teoretis yang menautkan idealisme Pancasila dengan langkah-langkah praktis pembudayaan karakter di ekosistem pendidikan (Creswell, 2018; Sugiyono, 2019).

Oleh karena itu, upaya menyintesiskan dimensi-dimensi filsafat ilmu pendidikan dengan praksis pembentukan karakter berlandaskan Pancasila menjadi sebuah kebutuhan akademis yang sangat mendesak. Berdasarkan latar belakang, identifikasi tantangan, dan kesenjangan literatur di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dimensi-dimensi kunci dalam filsafat ilmu pendidikan serta merumuskan arah relevansinya secara filosofis dan terstruktur bagi pembentukan karakter bangsa yang berakar pada nilai-nilai Pancasila (BPIP, 2025; UNESCO Institute for Lifelong Learning, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif-literatur dipilih karena memungkinkan peneliti untuk membedah, mendekonstruksi, dan menginterpretasikan konsep-konsep teoretis serta dimensi filosofis secara holistik, mendalam, dan kontekstual melalui penelusuran teks-teks ilmiah (Creswell, 2018; Sugiyono, 2019). Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang menguji hubungan statistik antar-variabel, penelitian ini menitikberatkan pada pemahaman konseptual mendasar mengenai bagaimana dimensi-dimensi filosofis dapat diterjemahkan menjadi prinsip dan praksis pendidikan karakter berbasis Pancasila. Kerangka metodologi ini dirancang secara sistematis untuk meletakkan dasar analisis yang solid, logis, dan sahih guna menyusun sintesis teoretis bagi pengembangan pendidikan nasional.

Secara skematis, tahapan alur kerja penelitian kepustakaan ini dijalankan melalui empat tahap utama sebagaimana disajikan pada Gambar 1 di bawah ini:



Gambar 1. Alur Tahapan Metodologi Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pada penelitian ini, "sampel" atau sumber data yang dianalisis bukanlah subjek manusia, melainkan sekumpulan dokumen dan literatur ilmiah sekunder yang dipilih secara sengaja menggunakan teknik purposive selection berdasarkan kriteria relevansi substansi, otoritas kelembagaan, serta kredibilitas akademik penerbit. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari tiga kelompok literatur utama, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi lembaga negara maupun organisasi internasional (seperti UU Sisdiknas dan dokumen UNESCO), buku-buku teks induk mengenai filsafat ilmu dan etika pendidikan, serta artikel jurnal ilmiah terakreditasi dari kurun waktu lima tahun terakhir (2021–2026) yang membedah isu pendidikan karakter dan nilai Pancasila. Pembatasan dan variasi elemen literatur ini dilakukan secara ketat guna memperoleh data konseptual yang kaya, multidimensional, dan jenuh (data saturation) terkait dimensi filosofis pendidikan karakter nasional.

Dalam penelitian kualitatif kepustakaan, instrumen utama (main instrument) tetap melekat pada peneliti sendiri (human instrument) yang berfungsi merancang fokus kajian, mengumpulkan dokumen, menilai bobot kualitas bacaan, serta menginterpretasikan makna teks secara mandiri dengan dibantu instrumen pelengkap berupa lembar matriks kodifikasi data dan kartu catatan bibliografi (Krippendorff, 2018; Sugiyono, 2019). Prosedur penelitian dilaksanakan melalui alur kerja terstruktur yang dimulai dari tahap penelusuran pustaka (literature searching) pada pangkalan data jurnal ilmiah digital (seperti Google Scholar, Sinta, Scopus, DOAJ) menggunakan kata kunci kombinasi seperti "filsafat ilmu pendidikan", "pendidikan karakter", dan "Pancasila". Selanjutnya, peneliti menyeleksi literatur yang lolos kriteria inklusi, membaca teks secara mendalam (in-depth reading), serta mencatat intisari

konseptual ke dalam matriks anotasi untuk mengelompokkan temuan ke dalam dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, antropologis, etis, dan teleologis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan tematik-induktif yang dijalankan secara interaktif dan berkelanjutan terhadap teks-teks pustaka hingga tuntas. Proses analisis merujuk pada tiga alur kegiatan simultan, yakni reduksi data dengan menapis dan membuang informasi yang tidak relevan, penyajian data (data display) dengan mengorganisasikan konsep ke dalam matriks perbandingan dan peta teoretis, serta penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis teoretis yang terstruktur. Untuk menjamin keabsahan dan keandalan hasil analisis agar terhindar dari bias subjektif peneliti, dilakukan teknik triangulasi sumber data dengan membandingkan argumentasi antar-regulasi, buku, dan jurnal, serta triangulasi teori untuk mengonfrontasikan temuan konseptual dengan teori-teori filsafat pendidikan yang sudah mapan guna menghasilkan analisis yang solid, sahih, dan masuk akal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan analisis konten (content analysis) dan reduksi tematik terhadap literatur regulasi, buku teks filosofis, serta artikel jurnal ilmiah, ditemukan dua temuan utama yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Temuan pertama berkaitan dengan sintesis enam dimensi filsafat ilmu pendidikan, sedangkan temuan kedua mencakup pemodelan ekosistem pendidikan karakter berorientasi Pancasila dan implikasinya bagi manajemen pendidikan.

Hasil penelaahan kepustakaan mengidentifikasi bahwa filsafat ilmu pendidikan tidak hanya terdiri atas tiga cabang klasik (ontologi, epistemologi, dan aksiologi), melainkan mencakup enam dimensi komprehensif yang saling bertautan. Enam dimensi tersebut adalah dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, antropologis, etis, dan teleologis. Penjabaran kerangka konseptual serta implikasi pedagogis dari masing-masing dimensi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 2. Sintesis Dimensi Filsafat Ilmu Pendidikan dan Implikasi Pedagogisnya

Dimensi Filosofis	Fokus Pertanyaan Dasar	Subjek/Objek Kajian	Implikasi dalam Praksis Pendidikan
Ontologis	Apa hakikat manusia dan pendidikan?	Peserta didik sebagai pribadi bermartabat utuh.	Memanusiakan manusia; menyeimbangkan potensi kognitif, moral, dan spiritual.
Epistemologis	Bagaimana pengetahuan diperoleh dan diuji?	Cara belajar, penyusunan kurikulum, dan pengujian kebenaran.	Menghindari hafalan deklaratif; menekankan refleksi, penalaran kritis, dan analisis bukti.
Aksiologis	Untuk apa ilmu dan pendidikan dikembangkan?	Orientasi nilai, moral, dan arah penggunaan pengetahuan.	Menjadikan Pancasila sebagai benteng etis agar Iptek tidak kehilangan kemanusiaan.
Antropologis	Bagaimana posisi manusia dalam konteks sosial?	Manusia sebagai makhluk individu, sosial, dan berbudaya.	Merawat keragaman tradisi/budaya lokal sekaligus memperkuat identitas nasional.

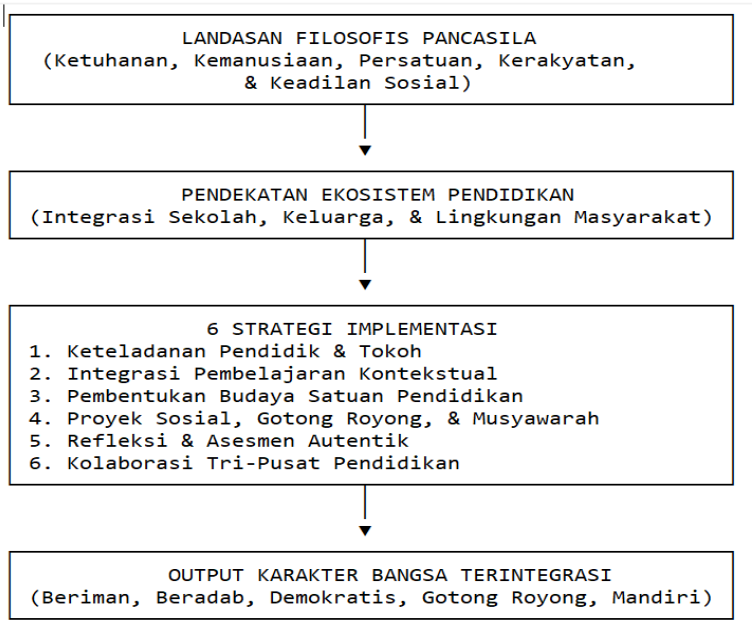
Etis	Bagaimana kewajiban dan tanggung jawab moral dijalankan?	Keputusan pedagogis guru dan konsistensi perilaku.	Menuntut keteladanan pendidik dan integritas moral dalam setiap tindakan edukatif.
Teleologis	Apa tujuan akhir dari proses pendidikan?	Orientasi capaian jangka panjang sistem pendidikan.	Mengarah pada pembentukan warga negara berintegritas dan mampu mengambil keputusan etis.

Berdasarkan sintesis dimensi filosofis yang telah diuraikan, pembentukan karakter bangsa tidak dapat dipisahkan dari aktualisasi nilai-nilai dasar Pancasila dalam ekosistem pendidikan. Nilai-nilai sublim yang terkandung dalam Pancasila membutuhkan kerangka operasional agar tidak berhenti pada tataran retorika atau doktrinasi tekstual semata. Oleh karena itu, lima sila Pancasila ditranslasikan secara pedagogis ke dalam orientasi karakter mendasar beserta bentuk aksi konkretnya di lingkungan satuan pendidikan. Sintesis matriks operasionalisasi nilai-nilai Pancasila dalam praksis pembentukan karakter disajikan pada Tabel 2.

Tabel 3. Matriks Operasionalisasi Lima Sila Pancasila dalam Pembentukan Karakter

Sila	Orientasi Karakter	Contoh Praktik Pendidikan
Ketuhanan Yang Maha Esa	Integritas spiritual, toleransi, tanggung jawab moral	Refleksi nilai, penghormatan keyakinan, budaya jujur
Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	Empati, penghormatan martabat, anti-kekerasan	Pembelajaran inklusif, kepedulian, penyelesaian konflik
Persatuan Indonesia	Cinta tanah air, kebinekaan, gotong royong	Proyek lintas budaya, kerja kelompok, kegiatan kebangsaan
Kerakyatan... Permusyawaratan/Perwakilan	Demokrasi, dialog, berpikir kritis, tanggung jawab	Musyawarah kelas, debat beretika, organisasi siswa
Keadilan Sosial bagi Rakyat Indonesia	Keadilan, kepedulian, solidaritas, anti-diskriminasi	Proyek sosial, berbagi peran, pelayanan masyarakat

Operasionalisasi nilai-nilai Pancasila sebagaimana disajikan pada Tabel 2 tidak dapat berdiri sendiri secara parsial. Untuk menjamin keberhasilannya, seluruh orientasi karakter tersebut perlu diwadahi dalam sebuah pendekatan ekosistem pendidikan yang holistik dan terintegrasi. Pendekatan ini menyeimbangkan antara pemikiran kritis, penghayatan etis, dan tindakan nyata melalui enam strategi implementasi yang saling terhubung. Alur struktur integrasi pendidikan karakter berbasis Pancasila disajikan pada Gambar 1.



Gambar 2. Gambar Model Ekosistem Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila.

Pembahasan

Hasil penelitian ini memberikan penegasan konseptual bahwa reduksi pendidikan hanya pada capaian kognitif-akademis merupakan bentuk penyempitan ontologis terhadap hakikat manusia. Sebagaimana ditunjukkan dalam temuan dimensi ontologis dan antropologis, peserta didik adalah makhluk multidimensional yang memiliki dimensi spiritual, emosional, dan sosiokultural. Temuan ini sejalan dengan pandangan Gay (2018) serta Banks (2019) yang menekankan pentingnya pendekatan pendidikan yang responsif terhadap budaya dan keutuhan latar belakang peserta didik. Ketika sistem pendidikan hanya berorientasi pada nilai ujian formal, pendidikan kehilangan daya humanisasinya dan berisiko mencabut peserta didik dari akar kebudayaannya.

Pada dimensi epistemologis dan etis, temuan kajian ini menggarisbawahi bahwa pengetahuian nilai moral tidak akan bermakna apabila hanya berhenti pada hafalan deklaratif. Seseorang dapat dengan mudah menghafal definisi "keadilan" atau "gotong royong", namun hal tersebut tidak serta-merta menjamin terbentuknya karakter etis. Temuan ini memperkuat argumen Nguyen & Redding (2020) mengenai pentingnya menciptakan ruang belajar yang memungkinkan peserta didik melakukan refleksi kritis, dialog etis, dan pengalaman langsung. Dalam kerangka ini, keteladanan pendidik dan iklim sekolah menjadi instrumen epistemologis utama untuk mentransformasikan pengetahuan nilai menjadi tindakan nilai.

Kajian ini memiliki posisi unik dan memberikan kebaruan (novelty) teoretis dibandingkan dengan penelitian-penelitian lima tahun terakhir. Penelitian terdahulu seperti Budiono (2021), Kharisma et al. (2022), serta Zulyana et al. (2025) sebagian besar menelaah Pendidikan Pancasila dari sudut pandang praksis kurikulum atau strategi instruksional guru di dalam kelas semata. Sementara itu, kajian ini berhasil merekonstruksi secara komprehensif bahwa Pendidikan Pancasila merupakan sebuah ekosistem filosofis. Pancasila tidak diposisikan sebagai dokumen politik atau mata pelajaran yang terisolasi, melainkan sebagai horizon aksiologis dan teleologis yang menjiwai seluruh keputusan manajemen dan budaya sekolah.

Bagi manajemen pendidikan, temuan ini memberikan implikasi praktis yang signifikan.

Para manajer pendidikan, kepala sekolah, dan pembuat kebijakan tidak boleh mengelola lembaga pendidikan hanya berbasis pada prinsip efisiensi administratif semata. Keputusan tata kelola—mulai dari alokasi sumber daya, manajemen konflik, regulasi kedisiplinan, hingga instrumen asesmen—harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Kepala sekolah perlu menciptakan iklim sekolah yang demokratis, inklusif, dan menghargai kesetaraan agar nilai-nilai Pancasila hidup dalam interaksi keseharian.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena dilaksanakan menggunakan desain studi kepustakaan (library research) berbasis analisis dokumen konseptual. Analisis yang dihasilkan masih berada pada tataran sintesis teoretis-makro dan belum menguji tingkat efektivitas ekosistem ini secara empiris di lapangan. Oleh karena itu, arah penelitian di masa depan disarankan untuk menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) atau mixed-methods. Peneliti selanjutnya dapat menguji penerapan model ekosistem ini melalui studi kasus di sekolah-sekolah penggerak atau mengembangkan instrumen evaluasi autentik untuk mengukur perkembangan karakter afektif peserta didik secara terukur di ruang publik.

KESIMPULAN

Temuan Mendasar: Filsafat ilmu pendidikan memberikan fondasi teoretis yang utuh melalui dimensi ontologis, epistemologis, aksiologis, antropologis, etis, dan teleologis dalam mendefinisikan hakikat manusia, cara memperoleh pengetahuan, orientasi nilai, konteks budaya, tanggung jawab moral, dan tujuan akhir pendidikan. Dalam konteks Indonesia, seluruh dimensi tersebut saling berkelindan dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana pendidikan karakter harus dipahami sebagai proses pembudayaan holistik yang mengintegrasikan pengetahuan, sikap, komitmen, dan tindakan nyata, bukan sekadar hafalan sila-sila secara verbalistik. **Implikasi:** Secara praktis dan manajerial, temuan ini menuntut para pengelola satuan pendidikan untuk mentransformasikan kepemimpinan dan iklim sekolah berbasis nilai, sehingga seluruh kebijakan, metode pembelajaran kontekstual, dan regulasi kedisiplinan berorientasi pada penciptaan ekosistem sekolah yang mampu membentuk manusia Indonesia yang berkarakter, bermartabat, demokratis, inklusif, serta bertanggung jawab. **Batasan:** Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis kepustakaan dan sintesis teoretis-konseptual berbasis dokumen regulasi dan literatur ilmiah, sehingga belum menguji efektivitas penerapannya secara langsung di lapangan. **Penemuan masa depan:** Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menerapkan pendekatan empiris kuantitatif atau mixed-methods guna mengukur secara terukur tingkat keberhasilan integrasi dimensi filosofis Pancasila ini terhadap pembentukan karakter afektif dan perilaku etis peserta didik di berbagai jenjang persekolahan.

REFERENSI

Agung, I., & Riaty, E. (2022). Integration of Pancasila values in strengthening character education of students. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 421–432. https://doi.org/10.23887/jpi-undiksha.v11i3.45120

Amren, A., Suyitno, S., & Rahmawati, R. (2024). Tantangan kebangsaan dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di era digital. Jurnal Kewarganegaraan, 8(1), 112–125. https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.5432

Aristotle. (2004). Nicomachean ethics. Penguin Classics.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2023a). Buku panduan guru Pendidikan Pancasila SMP/MTs kelas VII. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

https://bpip.go.id/publikasi/buku-panduan-guru-smp-7

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2023b). Pendidikan Pancasila SMA/SMK/MA/MAK kelas XI. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. https://bpip.go.id/publikasi/buku-siswa-sma-11

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. (2025). Dokumen perencanaan dan penguatan pembangunan karakter bangsa berlandaskan Pancasila. BPIP RI. https://bpip.go.id/dokumen/renstra-karakter-2025

Banks, J. A. (2019). An introduction to multicultural education (6th ed.). Pearson.

Budiono, A. (2021). Penguatan pendidikan multikultural berbasis Pancasila dalam merawat keragaman bangsa. Jurnal Pendidikan Karakter, 11(2), 145–158. https://doi.org/10.21831/jpk.v11i2.38910

Creswell, J. W. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Dewantara, K. H. (2013). Karya Ki Hadjar Dewantara, Bagian I: Pendidikan. UST Press.

Firmansyah, A., & Sukiyanto, S. (2023). Epistemologi dan filsafat ilmu pendidikan dalam pengembangan kurikulum berbasis karakter. *Jurnal Pedagogi dan Pembelajaran*, 6(2), 210–222. https://doi.org/10.23887/jpai.v6i2.58912

Gay, G. (2018). Culturally responsive teaching: Theory, research, and practice (3rd ed.). Teachers College Press.

Jamaludin, U., Fitriani, A., & Hermawan, A. (2023). Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter peserta didik di sekolah dasar. Jurnal Elemen Edukasi, 6(1), 78–89. https://doi.org/10.31980/jee.v6i1.2145

Kharisma, D., Wibowo, A., & Setiawan, B. (2022). Internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam membangun karakter generasi milenial di era globalisasi. Jurnal Moral Kebangsaan, 7(2), 201–214. https://doi.org/10.21009/jmk.v7i2.29810

Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE Publications.

Lickona, T. (1991). Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility. Bantam Books.

Mulyono, S., & Suryadi, A. (2024). Reorientasi nilai aksiologis dan etis Pancasila dalam era kecerdasan buatan. *Jurnal Moral dan Kewarganegaraan*, 12(1), 88–101. https://doi.org/10.21009/jmk.v12i1.34120

Nguyen, T. H., & Redding, C. (2020). Conceptualizing critical reflection in character and value education. Journal of Moral Education, 49(3), 310–326. https://doi.org/10.1080/03057240.2019.1687380

OECD. (2019). OECD future of education and skills 2030: OECD learning compass 2030. OECD Publishing. https://www.oecd.org/education/2030-project/teaching-and-learning/learning/

Prastowo, A., & Wardani, K. (2022). Relevansi ontologis filsafat pendidikan Ki Hadjar Dewantara dan Pancasila di abad 21. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 33–47. https://doi.org/10.21831/jpk.v12i1.41209

Rasyid, M., Hidayat, N., & Abdullah, S. (2024). Integrasi nilai-nilai multikultural dalam paradigma pendidikan nasional. Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pembelajaran, 12(1), 45–59. https://doi.org/10.23887/jipp.v12i1.67123

Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sekneg RI. https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003

tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78. https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2003

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

UNESCO. (2015). Global citizenship education: Topics and learning objectives. UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000232993

UNESCO. (2021). Reimagining our futures together: A new social contract for education. UNESCO Publishing. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379381

UNESCO. (2023). Global citizenship education: Advocacy, practice and awareness handbook for teachers. UNESCO Office Bangkok & APCEIU. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000385102

UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2023). Citizenship education is key to creating a lifelong learning culture. UNESCO. https://uil.unesco.org/citizenship-education-key

Wibowo, A. M., & Handayani, T. (2025). Transformation of civic education and character building through Pancasila paradigm in secondary education. *International Journal of Educational Research & Innovation*, 19(2), 145–160. https://doi.org/10.24042/ijeri.v19i2.18920

Zulyana, E., Rahayu, S., & Pratama, F. (2025). Evaluasi implementasi Kurikulum Merdeka pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Jurnal Analisis Pendidikan, 9(1), 15–29. https://doi.org/10.26737/jap.v9i1.4120

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA